



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI

(RKP-NAG)

T.A. 2023

NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

Kecamatan Airpura

Kabupaten Pesisir Selatan

Propinsi Sumatera Barat



PEMERINTAH NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

Alamat : Medan Baik



**PERATURAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Tluk Kualo Inderapura Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
25. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
26. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2023
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagari dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum penyusunan, serta Manfaat penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari, Dan Pembiayaan.

BAB III EVALUASI RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP Nagari

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Wali Nagari melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Tahun 2023.

Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.

(2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Tluk Kualo Inderapura Keamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

BAMUS NAGARI
TLUK KUALO INDERAPURA



ERWIN
Diundangkan di Medan Baik
Pada Tanggal 13 Desember 2022
Sekretaris Nagari

ALIS FIKI INDRA, S.Kom

Ditetapkan di Medan Baik
Pada tanggal 13 Desember 2022

WALI NAGARI
TLUK KUALO INDERAPURA



DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I

Lembaran Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 3 Tahun 2022

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP NAGARI

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Wali Nagari tentang Tim Penyusun RKP Nagari.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Nagari.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Nagari.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2022.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Nagari.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Nagari.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Nagari.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Nagari Tahun 2023.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Nagari dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Nagari (DU-RKP Nagari) Tahun 2024.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Nagari Tahun 2022.		
14.	Keputusan BAMUS tentang panitia musyawarah Nagari tentang Perencanaan Nagari.		

15.	Berita Acara Musyawarah Nagari tentang Perencanaan Nagari.(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BAMUS.		
17.	Rancangan RKP Nagari Tahun 2022. (<i>Hasil Musnag Perencanaan Nagari</i>)		
18.	Keputusan Wali Nagari tentang Panitia Musrenbang RKP Nagari.		
19.	Tata Tertib Musrenbang RKP Nagari.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang RKP Nagari. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Nagari Tahun 2023. (<i>Hasil Musrenbang Nagari yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BAMUS tentang panitia musyawarah Nagari tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Nagari.		
24.	Berita Acara Musnag tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Nagari. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Nagari Tahun 2023 dan DU-RKP Nagari Tahun 2024.		
26.	Peta Nagari.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Nagari.		
	c. Musnag Perencanaan Nagari.		
	d. Musrenbang Nagari RKP Nagari.		
	e. Musnag pembahasan dan pengesahan RKP Nagari.		

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2022. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan Nagari yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Nagari Tluk Kualo Inderapura yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Nagari ini sebagai referensi untuk pembangunan di Nagari sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari dan Peraturan Menteri Nagari, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, *yakni*:

1. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Nagari;
3. pencermatan ulang RPJMNagari;
4. penyusunan rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari;
5. Musrenbang Nagari pembahasan rancangan RKP Nagari dan DU- RKP Nagari; dan
6. musyawarah Nagari pembahasan dan pengesahan RKP Nagari dan DU-RKP Nagari.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Nagari merupakan rencana strategis dari hasil potret Nagari yang telah dilakukan oleh Nagari sendiri semisal Pendataan SDGs Nagari, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Nagari itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Nagari Tahun 2023 Nagari Tluk Kualo Inderapura adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Nagari yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Nagari, arah dan strategi pembangunan Nagari, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Nagari Tahun 2023 Nagari Tluk Kualo Inderapura adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;

3. Terciptanya sinergitas pembangunan Nagari Tluk Kualo Inderapura dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan Nagari serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Nagari Tluk Kualo Inderapura selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Nagari Tahun 2023 Nagari Tluk Kualo Inderapura kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Tluk Kualo Inderapura ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Nagari yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Medan Baik, 16 November 2022

Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura

Dedi Joafnaldi, S.Sos.I

DAFTAR ISI

Cover

Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022

Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Nagari	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I
1.2. Dasar Hukum.....	II
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	IV
1.4. Proses Penyusunan RKP Nagari.....	V
1.5. Sistematika	V
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI	
2.1. Visi dan Misi Wali Nagari.....	VII
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	VIII
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	IX
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	IX
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	XI
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari Tahun sebelumnya.....	XIII
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Nagari.....	XIV
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari	XIV
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	XVIII
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	XVIII
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagari Tahun Anggaran 2023	XIX
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	XXII
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari	XXII
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023	XXII
4.5. Kebijakan Keuangan Nagari	XXIII
BAB V PENUTUP	
Penutup	XXVI

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Wali Nagari tentang Tim Penyusun RKP Nagari Tahun 2023
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Nagari.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Nagari.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Kegiatan.
7. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
8. Daftar Usulan RKP Nagari Tahun 2024.
9. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Nagari.
10. Keputusan BAMUS tentang panitia musyawarah Nagari tentang perencanaan Nagari.
11. Berita Acara Musyawarah Nagari tentang perencanaan Nagari, Notulen dan Daftar Hadir.
12. Dokumen Pandangan Resmi BAMUS.
13. Keputusan Wali Nagari tentang Panitia Musrenbang Nagari RKP Nagari tahun 2023.
14. Tata tertib musrenbang Nagari RKP Nagari.
15. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
16. Berita Acara Musrenbang Nagari RKP Nagari tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Keputusan BAMUS tentang panitia musyawarah Nagari tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Nagari tahun 2023.
18. Dokumen Rancangan RKP Nagari Tahun 2022 dan DU-RKP Nagari Tahun 2024.
19. Berita Acara Musyawarah Nagari tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Nagari tahun 2023., Notulen dan Daftar Hadir.
20. Dokumen RKP Nagari Tahun 2023 dan DU-RKP Nagari Tahun 2024.
21. Peta Nagari.
22. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Nagari.
 - c. Musnag Perencanaan Nagari.
 - d. Musrenbang Nagari RKP Nagari.
 - e. Musnagpembahasan dan pengesahan RKP Nagari.

RENCANAKERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Nagari.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Nagari, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Nagari sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Nagari yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari, pembangunan kawasan perNagarian/ antar Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, BAMUS dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
 28. Peraturan Nagari

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) tahun 2022 adalah rencana pembangunan tahunan Nagari yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke Enam dalam dokumen RPJM Nagari tahun 2017 - 2023

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Nagari dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di Nagari;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari dan antar Nagari.

1.3 PROSES PENYUSUNAN RKP NAGARI

Proses Penyusunan RKP Nagari Tluk Kualo Inderapura Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Nagari, PD TT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut:*

1. Pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Nagari;
3. Pencermatan ulang RPJMNagari;
4. Penyusunan rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari;
5. Musrenbang Nagari pembahasan rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari; dan
6. musyawarah Nagari pembahasan dan pengesahan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tluk Kualo Inderapura Tahun 2022 disusun dengan sistematika *sebagai berikut:*

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Nagari.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

- :**
- 2.1. Visi – Misi Wali Nagari.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Nagari.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagari Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Nagari.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Nagari, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Nagari secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Wali Nagari.

Visi-Misi Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura disamping merupakan Visi-Misi Wali Nagari Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Nagari untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Nagari ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Nagari.

Adapun Visi Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura, *sebagai berikut:*

“Mewujudkan Masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura Yang Mandiri, Agama dan Sejahtera berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Nagari Tluk Kualo Inderapura merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Nagari Tluk Kualo Inderapura

Dalam meraih visi Nagari Tluk Kualo Inderapura seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Nagari Tluk Kualo Inderapura *diantaranya:*

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah.
2. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan
3. Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis Kerakyatan
5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur
6. Melanjutkan Pembangunan Agama, adat dan Budaya
7. Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, yang unggul berlandaskan Moral Agama
8. Mewujudkan Pelestarian Kesenian dan Budaya Serta serta Tradisi Lokal Inderapura
9. Menciptakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai sarana dan Interaksi anak, Pemuda dan Masyarakat

h) GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan data Profil Nagari tahun 2022 sebesar 2.072 jiwa yang terdiri dari 1024 laki laki dan perempuan 1048 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1

Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	78 Jiwa	106 Jiwa	184 Jiwa	6,3 %
2.	5 - 9	69 Jiwa	95 Jiwa	164 Jiwa	5,6 %
3.	10 - 14	138 Jiwa	134 Jiwa	272 Jiwa	9,3 %
4.	15 - 19	134 Jiwa	148 Jiwa	283 Jiwa	9,7 %
5.	20 - 24	126 Jiwa	124 Jiwa	250 Jiwa	8,5 %
6.	25 - 29	135 Jiwa	129 Jiwa	264 Jiwa	9 %
7.	30 - 34	139 Jiwa	127 Jiwa	266 Jiwa	9,1 %
8.	35 - 39	150 Jiwa	134 Jiwa	284 Jiwa	9,7 %
9.	40 - 44	130 Jiwa	122 Jiwa	252 Jiwa	8,6 %
10.	45 - 49	92 Jiwa	91 Jiwa	183 Jiwa	6,2 %
11.	50 - 54	73 Jiwa	85 Jiwa	158 Jiwa	5,4 %
12.	55 - 59	77 Jiwa	71 Jiwa	148 Jiwa	5 %
13.	60 - 64	62 Jiwa	45 Jiwa	107 Jiwa	3,6 %
14.	65 +	50 Jiwa	48 Jiwa	98 Jiwa	3,3 %
Jumlah		1453 Jiwa	1459 Jiwa	2912 Jiwa	100 %

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin menurun walaupun penurunannya tidak begitu signifikan.

Tabel 2

Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2020		2021		2022		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	20	21	21	21	22	21	
Angkatan Kerja	254	197	135	167	178	139	
Mencari Kerja	159	52	131	47	127	33	

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Nagari Tluk Kualo Inderapura, masih terdapat 93 perempuan yang belum tamat SD dan 123 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3

Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	123	93	216
2.	Tamat SD	218	356	574
3.	Tidak Tamat SLTP	228	156	384
4.	Tamat SLTP	390	354	744
5.	Tamat Akademi / PT	178	165	343
Jumlah		1137	1124	2261

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4

Indikator Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	6	8	9
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	3	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	28	35	32
Balita Gizi Buruk	1	3	0

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

i)

GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Nagari Tluk Kualo Inderapura sejumlah 551KK, yang tersebar hampir merata di 2 (Dua) Kampung.

Tabel 5

Kategori Kemiskinan

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	8 KK	13 KK	18 KK
Hampir Miskin	16 KK	24 KK	34 KK
Miskin	413 KK	496KK	504 KK
Kaya	65 KK	338 KK	405 KK
Sangat Kaya	33 KK	28 KK	28 KK
JUMLAH	535 KK	532 KK	618 KK

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

j)

GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu Nagari dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat dalam table dibawah ini

Tabel 6

Pertumbuhan Ekonomi

Nagari Tluk Kualo Inderapura Tahun 2022

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022			
2021			
2020			

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	48 ha	5 ha	4 ha
	- Jagung	184 ha	140 ha	137 ha
	- Ubi Kayu	3 ha	4 ha	2 ha
2.	Buah Buahan			
	- Jeruk	61 ha	74 ha	83 ha
3.	Perkebunan			
	- Kelapa Sawit	207 ha	212 ha	224 ha

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1	Peternakan			
	- Sapi	35 ekor	32 ekor	21 ekor
	- Kerbau	7 ekor	5 ekor	5 ekor
	- Kambing	23 ekor	19 ekor	15 ekor
	- Ayam	70 ekor	83 ekor	68 ekor
2	Perikanan			
	- Kolam Ikan	20 kg	23 kg	56 kg

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

k)

GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Nagari Tluk Kualo Inderapurasebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Nagari			
	- Kerikil	200	3.700	3.900 M
	- Tanah	0	2.500	2.500 M
2	Jalan Antar Nagari			
	- Aspal	1,200	0	1.200 M
	- Kerikil	100	2.100	2.200 M
	- Tanah	0	2.100	2.100 M

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	Baik	-	9,2 km
2.	Saluran Skunder	Baik	-	7,6 km
3.	Saluran Tersier	-	Rusak	10,7 km

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2019	2020	2021
1.	Rumah Tidak Sehat	170 KK	104 KK	80 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	150 unit	64 unit	60 unit

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Nagari, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Nagari harus mempertimbangkan kondisi obyektif Nagari yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Nagari Tahun 2023 permasalahan Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. APB Nagari masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber PANagari masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Kampung Koto Pandan menuju Kelompok Tani Tandikek Jaya, dan jalan menuju wilayah Antar Nagari sehingga menghambat

- sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
 4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah Nagari masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs NAGARI

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Nagari tahun 2021 ini, NagariTluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan masuk pada tipologi Nagari Berkembang sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Nagari.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Nagari

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari Tluk Kualo Inderapura di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) *strategi* utama pembangunan jangka menengah Nagari secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

- 1).Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif
- 2).Terwujudnya infrastruktur Nagari yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
- 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 03Tahun 2019 tentang RPJM Nagari Tluk Kualo Inderapura tahun 2017- 2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Nagari Tahun 2018-2024 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah :

- Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat
- Tunjangan Wali Nagari Dan Perangkat
- Tunjangan Kehormatan BAMUS
- Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari
- Operasional BAMUS Nagari
- Program Jaminan Ketenaga Kerjaan Wali Nagari
- Program Jaminan Ketenagaan Perangkat Nagari
- Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Nagari
- Penghasilan Tambahan Wali Nagari
- Operasional Pemungutan PBB
- Operasional Raskin
- Operasional Register Nagari
- Musyawarah Nagari
- Musrenbang Nagari
- Operasional Pengelola Aset Nagari
- Rapat Tim Penyusun RKP
- Operasional Register
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari
- Kegiatan Verifikasi Kegiatan
- Pengadaan Mobier Kantor Wali Nagari
- Honorarium Pembersih Kantor
- Operasional Penyetoran Pajak Nagari
- Operasional Kader Nagari Siaga
- Operasional Penyetoran Pjak Nagari
- Honorarium Operator Siskudes
- Pembuatan Spanduk Sosialisasi dan Informasi Nagari
- Pengadaan AC Kantor
- Pengadaan CCTV Kantor
- Pengadaan Printer 1 Unit
- Pengadaan Leptop 1 Unit

➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari.

Pada bidang Pembangunan Pemerintahan Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah :

- Pembangunan Saung Tani
- Pembangunan Pasar Nagari
- Pemeliharaan Jembatan Hijau Palokan Hilir- lb. Gdg Lamo
- Pengerasan Jalan Bandarahan
- Pembangunan Cagar Budaya Sejarah Tuanku Berdarah Putih
- Pemeliharaan RPTRA
- Pembangunan Drainase Jalan Pemukiman
- Peningkatan Jalan Palokan Hilir

- Pemeliharaan Jemabatan Mini Jalan Kampung Tengah
- PPembangunan Irigasi Jalan Pematang Lesung
- Rabat Beton perkarangan TK-PAUD Harapan Bangsa
- Rabat Beton Jalan Jl. Studion Nagari
- Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- Pembangunan Jamban Masyarakat Miskin
- BPJS untuk Masyarakat Miskin
- Rehabilitas Gedung TK-PAUD Harapan Bangsa
- Bulan Bakti Gotong-Royong (BBGRM)
- Pembangunan Sanitasi Umum
- Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Medan Tengah
- Pembangunan Rumah Sehat
- Pembangunan Kawasan Agro Wisata
- Lanjutan Pagar Poskesri Nagari
- Pembanguna Saluran Buang Kelompok Pematang Nibung
- Peningkatan Jalan Kelompok Ganto Sori
- Belanja Bulanan Perawatan Jaringan Wifi
- Pembangunan Gudang POengolah Pupuk Organik
- Pengeringan Rawa Kawasan Kelompok Tani

➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari.

Pada bidang Kemasyarakatan Pemerintah Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah :

- Pembinaan PKK Nagari
- Kegiatan Pembinaan Majelis Taqlim
- Pembinaan Remaja Masjid
- Kegiatan MTQ
- Pembinaan LDS
- Pembinaan LPMN/KPMN
- Pemeliharaan Makam Nagari
- Sarana Dan Prasarana Olah Raga
- Kegiatan Lembaga Kepemudaan
- Kegiatan PHBN
- Honoor Imam Masjid
- Honor Garim
- Honor Saih Kaum
- Kegiatan Dasa Wisma
- Kegiatan Kelembagaan Adat Nagari
- Kegiatan PHBI
- KAN
- Kegiatan DARMA Wanita
- Kegiatan Jambore
- Kegiatan MUI

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Pada bidang Pemberdayaan Pemerintah Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah :

- Ketahanan Pangan

- Pelatihan Perangkat Nagari
- Pelatihan BAMUS Nagari
- Pelatihan LPMN
- Kegiatan Sanggar Seni
- Pelatihan Guru TPA
- Tambahan Nutrisi Untuk Balita
- Pelatihan Kader Dan Guru Tk/Paud
- Penyuluhan Narkoba
- PMT Bumil
- PMT Bumil Kek/Resti
- PMT Tk/Paud
- PMT Lansia
- PMT Balita Stunting
- Honor Kader Sweeping Penimmbang Balita
- Pengadaan Ape Tk/Paud
- Biaya Input Idm
- Wirid Remaja
- Pelatihan Bidang Olah Raga
- Insentif Guru Tpa
- Insentif Guru Paud
- Insentif Kader Nagari
- Bbgrm
- Pelatihan Kader Nagari Siaga
- Penyuluhan Bidang Kesehatan Masyarakat
- Study Banding
- Ambulan Nagari
- Sarana Dan Prasarana Kelompok Perikanan
- Bumnag
- Pelatihan Penyemblihan Hewan
- Pelatihan Kelompok Perikanan
- Pengadaan Baju Porbi Tluk Kualo Inderapura
- Pengadaan Alat Yandu Mangga Li
- Pengadaan Baju Seragam Kader
- Kegiatan Rds
- Pelatihan Masyarakat Ekonomi Kreatif

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya.
 Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya Pemerintahan Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah :
 - Penanggulangan Becana Alam
 - Penanggulangan Keadaan Darurat
 - Bantuan Langsung Tunai Keadaan Darurat
 - Penanguangan Keadaan Mendesak

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Nagari.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan Nagari banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah
2. Mewujudkan nagari Tluk Kualo Inderapura sebagai nagari tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Memperkuat tatakelola pemerintah yang bersih, efektif, demookratif dan trasparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
2. Pembangunan yang merata dalam peningkatan pendapatan masyarakat

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Nagari secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Nagari.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Tluk Kualo Inderapura secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA NAGARI TAHUN 2022

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Dan Adat Istiadat, Yang Meliputi:
 - a) Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
 - b) Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
 - c) Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat;
 - d) Pengelolaan Tanah Kas Nagari;
 - e) Pengembangan Peran Masyarakat Nagari
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari, Yang Meliputi:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Diantaranya:
 1. Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat
 2. Tunjangan Wali Nagari Dan Perangkat
 3. Tunjangan Kehormatan BAMUS
 4. Tunjangan Akhir Jabatan Dan Jaminan Kesehatan Wali Dan Perangkat
 5. Tunjangan Pengelola Aset Dan Keuangan Nagari
 6. Penghasilan Tambahan Wali Nagari
 7. Operasional Perkantoran
 8. Operasional BAMUS Nagari
 9. Operasional Pemungutan PBB
 10. Operasional RASKIN
 11. Musyawarah Nagari
 12. Musrenbang Nagari
 13. Operasional Pengelola Aset Nagari

14. Rapat Tim Penyusun RKP
15. Operasional Register
16. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari
17. Kegiatan Verifikasi Kegiatan
18. Pengadaan Mobier Kantor Wali Nagari
19. Honorarium Pembersih Kantor
20. Operasional Penyetoran Pajak Nagari
21. Operasional HANSIP / TRANTIB
22. Operasional Kader Nagari Siaga

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Diantaranya:

1. Pembangunan RTLH
2. Pengadaan MCK Masyarakat
3. BPJS untuk Masyarakat Miskin
4. Lanjutan Pembangunan Gedung Sanggar Seni Tahap 3
5. Pembukaan Jalan Baru Dusun Bukit
6. Pembangunan Pagar PAUD Al-Furqon
7. Lanjutan Sawah Bukit Tahap 3
8. Peningkatan Jalan Usaha Tani Tandikek Jaya
9. Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola
10. Rabat Beton Jalan TPU Kayu Aro
11. Pembangunan Drainase Jalan Tambak
12. Lanjutan Drainase Dari Rumah Janar Ke Simpang
13. Penamhan Jaringan PDAM Kamlung Lubuk Pandan
14. Pembangunan Drainase Kampung Lubuk Pandan
15. Pembangunan Gedung Pos Gizi
16. Pembangunan Gudang Kantr Wali Nagari
17. Pembangunan Tempat Parkir Kantor Wali Nagari
18. Pembangunan Taman Kantoor Wali Nagari
19. Pembangunan Kantor BAMUS Nagari
20. Pemeliharaan Gedung Kantor Wali Nagari
21. Pembukaan Jalan Usaha Tani Lubuk Sari Bulan
22. Rabat Beton Jalan Lubuk Pandan Ke Jembatan Gantung
23. Sarana Dan Prasarana TK/PAUD Koto Pandan
24. Peningkatan Jalan TPU Tambak
25. Pembangunan UKS TK/Paud Al Furqon
26. Pembukaan Jalan Baru Dari Rumah Buk Is Ke Rumah Maradis
27. Penambahan Teras Yandu Mangga II
28. Sarana Dan Prasarana Puskesmas

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Diantaranya:

1. Pembinaan PKK Nagari
2. Kegiatan Pembinaan Majelis Taqlim
3. Pembinaan Remaja Masjid
4. Kegiatan MTQ
5. Pembinaan LDS
6. Pembinaan LPMN/KPMN
7. Pemeliharaan Makam Nagari
8. Sarana Dan Prasarana Olah Raga
9. Kegiatan Lembaga Kepemudaan

10. Kegiatan PHBN
11. Honoor Imam Masjid
12. Honor Garim
13. Honor Saih Kaum
14. Kegiatan Dasa Wisma
15. Kegiatan Kelembagaan Adat Nagari
16. Kegiatan PHBI
17. KAN
18. Kegiatan DARMA Wanita
19. Kegiatan Jambore
20. Kegiatan MUI

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Diantaranya:

1. Ketahanan Pangan
2. Pelatihan Perangkat Nagari
3. Pelatihan BAMUS Nagari
4. Pelatihan LPMN
5. Kegiatan Sanggar Seni
6. Pelatihan Guru TPA
7. Tambahan Nutrisi Untuk Balita
8. Pelatihan Kader Dan Guru Tk/Paud
9. Penyuluhan Narkoba
10. PMT Bumil
11. PMT Bumil Kek/Resti
12. PMT Tk/Paud
13. PMT Lansia
14. PMT Balita Stunting
15. Honor Kader Sweeping Penimmbang Balita
16. Pengadaan Ape Tk/Paud
17. Biaya Input Idm
18. Wirid Remaja
19. Pelatihan Bidang Olah Raga
20. Insentif Guru Tpa
21. Insentif Guru Paud
22. Insentif Kader Nagari
23. Bbgrm
24. Pelatihan Kader Nagari Siaga
25. Penyuluhan Bidang Kesehatan Masyarakat
26. Study Banding
27. Ambulan Nagari
28. Sarana Dan Prasarana Kelompok Perikanan
29. Bumnag
30. Pelatihan Penyemblihan Hewan
31. Pelatihan Kelompok Perikanan
32. Pengadaan Baju Porbi Tluk Kualo Inderapura
33. Pengadaan Alat Yandu Mangga Ii
34. Pengadaan Baju Seragam Kader
35. Kegiatan Rds
36. Pelatihan Masyarakat Ekonomi Kreatif

E). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

1. Penanggulangan Bencana Alam
2. Penanggulangan Keadaan Darurat
3. Bantuan Langsung Tunai Keadaan Darurat
- 4.. Penanguangan Keadaan Mendesak

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan HakAsal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMNagariTahun 2017-2023 dengan memprioritaskan tentang : 1). Peningkatan ekonomi masyarakat. 2). Meningkatkan standar pendidikan. 3). Pengembangan kesenianNagari. 4). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nagari.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA NAGARI

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan *yang meliputi:*

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Prioritas program pembangunan skala Supra Nagari/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tetapi pemerintah Nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Nagari. Kedua, secara pembiayaan Nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Nagari Tluk Kualo Inderapura yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pembangunan Saung Tani (kelompok Tani)
2. Pengadaan Bibit Pertanian dan Peternakan
3. Pengadaan Mesin Panen Padi
4. Pengadaan bibit Ikan
5. Penambahan Modal BUMNAG

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
2. Pengadaan MCK warga kurang Mampu
3. Pengadaan Ambulance Nagari
4. Pengadaan Lahan TPU
5. Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pengaspalan Menuju SMPN 2 Airpura
2. Pengaspalan Jalan TPU Kayu Aro ke Dusun Bukit
3. Lanjutan Pembangunan TPT dan Normalisasi batang sungai Inderapura
4. Pembangunan Dreinase Lubuk Pandan
5. Lanjutan Pembangunan Dreinase Kampung Koto Pandan
6. Pengaspalan Jalan Dusun Tambak

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari membahas dan menyepakati Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Nagari, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BAMUS untuk penetapannya. Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPBNagari) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening KasNagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Nagari, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Nagari yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Tluk Kualo InderapuraKecamatan Airpura Kabupaten Pesisir SelatanTahun Anggaran 2022 sebesar Rp`10.000.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang *bersumber dari:*

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Nagari		10.000.000,-
	a. Pengelolaan Tanah Kas Nagari	Rp.	1.285.202.248,-
	b. <i>lain-lain</i>	Rp.	00.000.000,-
2.	Dana Nagari bersumber APBN (DD)	Rp.	846.000.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	20.385.248.000,-
4.	Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp.	418.817.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	00.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	00.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	10.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah	Rp.	00.000.000,-
	JUMLAH	RP.	1.295.202.248,-

b. Belanja Nagari

Kebijakan Umum Belanja Nagari adalah *sebagai berikut*:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	498.162.675,67
2.	Bid. Pembangunan Nagari	Rp.	242.528.250,00
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	48.378.170,00
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	178.975.500,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan MenNagarik Dan Darurat Lainnya	Rp.	406.080.000,00
TOTAL		Rp.	1.374.124.595,67

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Nagari:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari danPerangkat Nagari	Rp.	333.600.000
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Nagari	Rp.	71.850.000
Jumlah		Rp.	405.450.000

c. Pembiayaan

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Nagari.

BAB V

PENUTUP

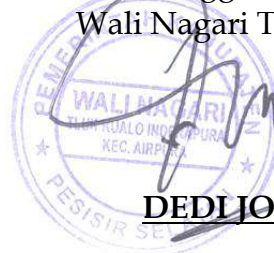
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari untuk saling bekerjasama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Nagari. Untuk itu dalam penyusunan APB Nagari diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Nagari ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Nagari.

Ditetapkan di Nagari Tluk Kualo Inderapura

Pada tanggal: 13 Desember 2022

Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura



DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP)
TAHUN : 2023

DESA : TLUK KUALO INDERAPURA
KECAMATAN : AIRPURA
KABUPATEN : PESISIR SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	Tluk Kualo	12 Bulan	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	51,600,000	ADD	√			2023
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	Tluk Kualo	12 Bulan	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	282,000,000	ADD	√			2023
		3	Tunjangan kehormatan Bamus	Tluk Kualo	12 Bulan	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	68,700,000	ADD	√			2023
		4	Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari	Tluk Kualo	12 Bulan	Pemerintah Nagari	1 Tahun	42,000,000	ADD	√			2023
		5	Operasional Bamus	Tluk Kualo	12 Bulan	Bamus Nagari	1 Tahun	17,500,000	ADD	√			2023
		6	Program Jaminan Ketenaga Kerjaan Wali Nagari	Tluk Kualo	12 Bulan	Pemerintah Nagari	1 Tahun	3,600,000	ADD	√			2023
		7	Jaminan Ketenagakerjaan bagi perangkat Nagari	Tluk Kualo	12 Bulan	Pemerintah Nagari	1 Tahun	14,107,500	ADD	√			2023
		8	Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan perangkat	Tluk Kualo	12 Bulan	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	15,180,000	ADD	√			2023
		9	Honor Pengelola Keuangan Nagari	Tluk Kualo	10 Bulan	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	22,800,000	ADD	√			2023
		10	Lanjutan Pembangunan Sarana & Prasarana Kantor wali Nagari	Tluk Kualo	1 Paket	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	55,469,072	ADD	√			2023
		11	Pembelian mobiler Kantor Wali Nagari	Medan Baik	1 Paket	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	15,000,000	ADD	√			2023
		12	Pembuatan Spanduk Sosialisasi dan Informasi Nagari	Tluk Kualo	12	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	3,600,000	ADD	√			2023
		13	Pembuatan Nomor Rumah Penduduk	Tluk Kualo	532 KK	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	ADD	√			2023

Jumlah	14	Belanja Pendistribusian Raskin	Tluk Kualo	1 Paket	Nagari	1 Tahun	3,045,000	ADD	√			2023
	15	Musyawarah Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Tluk Kualo	400 Orang	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	11,000,000	ADD	√			2023
	16	Pengadaan AC	Tluk Kualo	15 Orang	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	9,000,000	ADD	√			2023
	17	Pengadaan Kamera CCTV Kantor	Tluk Kualo	1 Paket	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	8,000,000	ADD	√			2023
	18	Pengadaan Printer 2 Unit	Tluk Kualo	2 Unit	Pemerintah Nagari	1 Tahun	8,000,000	ADD	√			2023
	19	Pengadaan Leptop 2 Unit	Tluk Kualo	2 Unit	Pemerintah Nagari	1 Tahun	12,000,000	ADD	√			2023
	20	Honorarium Tim RKP/RPJM Nagari	Tluk Kualo	12 Bulan	Tim Rkp	1 Tahun	1,200,000	ADD	√			2023
	21	Honorarium Tim Verifikasi	Tluk Kualo	12 Bulan	Tim Verifikasi	1 Tahun	900,000	ADD	√			2023
	22	Honorarium Tim Penerima Kegiatan (TPHP) 3 Orang	Tluk Kualo	12 Bulan	Tim TPHP	1 Tahun	600,000	ADD	√			2023
	23	Penegasan Batas Nagari	Tluk Kualo	5 Titik	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	2,500,000	ADD	√			2023
	24	Penyusunan Tata Ruang Nagari	Tluk Kualo	1 Paket	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	20,000,000	ADD	√			2023
	25	Informasi dan Publikasi Nagari	Tluk Kualo	5 Unit	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	20,000,000	ADD	√			2023
	26	Belanja Operasional Pemungutan PBB	Tluk Kualo	1 Paket	Pemerintahan Nagari	1 Tahun	2,000,000	ADD	√			2023
	27	Profil Nagari	Tluk Kualo	12 Bulan	Pemerintah		7,000,000	ADD	√			2023
	28	Pendataan dan Penginputan SDGs Desa	Tluk Kualo	8 Bulan	Pemerintah Nagari	1 Tahun	30,000,000	DD	√			2023
	29	Kegiatan pemetaan peta Asset Dan Milik Nagari	Tluk Kualo	1 Paket	Nagari pemerintahan	45 Hari	60,000,000	DD	√			2023
	30	Biaya Survei Lapangan	Tluk Kualo	12 Bulan	Tim Survei	1 Tahun	5,680,000	ADD	√			2023
							802,481,572.00					2023
	1	Pembangunan Saung Tani	Medan Baik	1 Unit	Masyarakat	25 Hari	90,000,000	DD	√			2023
	2	Pembangunan Pasar Nagari	Medan Baik	1 Paket	Masyarakat	27 Hari	300,000,000	DD	√			2023
	3	Pemeliharaan Jembatan Hijau Palokan Hilir-Lb Gdg Lamo	Medan Baik dan R Lumang	1 Paket	Masyarakat	27 Hari	50,000,000	DD	√			2023
	4	Pembangunan Cagar Budaya Sejarah Tuanku Berdarah Putih	Tluk Kualo Inderapura	1 Unit	Masyarakat	30 Hari	50,000,000	DD	√			2023

**Pembangunan
Desa**

5	Pembangunan Drainase Jalan Pemungkiman	Tluk Kualo Inderapura	70 Meter	Masyarakat	20 Hari	40,000,000	DD	√			2023
6	Peningkatan Jalan Palokan hilir	Tluk Kualo Inderapura	1 Unit	Masyarakat	30 Hari	50,000,000	DD	√			2023
7	Pengerasan Jalan Bandarahan	Medan Baik		Masyarakat	27 Hari	80,000,000	DD	√			2023
8	Pemeliharaan Jembatan Mini Jl.Kampung Tengah	Rimbo Lumang	1 Unit	Masyarakat	27 Hari	10,000,000	DD	√			2023
9	Pembangunan Irigasi Jl.Pematang Lesung	Medan Baik	1 Paket	Masyarakat	27 Hari	10,000,000	DD	√			2023
10	Rabat Beton Perkarangan TK-PAUD Harapan Bangsa	Medan Baik	1 Paket	Masyarakat	27 Hari	10,000,000	DD	√			2023
11	Pemeliharaan RPTRA	Medan Baik	1 Paket	Masyarakat	27 Hari	15,000,000	DD	√			2023
12	Rabat Beton Jl.Stadion Nagari	Medan Baik	1 Paket	Masyarakat	27 Hari	100,000,000	DD	√			2023
8	Pembangunan Rumah tidak Layak Huni	Tluk Kualo Inderapura	2 Unit	Masyarakat Miskin	20 Hari	60,000,000	DD	√			2023
9	Pembangunan Jamban Masyarakat Miskin	Tluk Kualo Inderapura	8 Unit	Masyarakat	20 Hari	36,000,000	DD	√			2023
10	Pengadaan Alat dan Peralatan POSKESRI	Medan Baik dan R Lumang	2 Paket	Poskesri	30 Hari	25,000,000	DD	√			2023
11	Pembangunan Drainase Jalan Pemungkiman	Tluk Kualo Inderapura	2 Km	Masyarakat	20 Hari	400,000,000	DD/APBD	√			2023
12	Rehabilitasi gedung TK PAUD Harapan bangsa	Medan Baik-Rimbo Lumang	1 unit	Masyarakat	61 Hari	50,000,000	DD	√			2023
13	Pembangunan fasilitas olah raga	Medan Baik	1 Unit	Pemuda dan Masyarakat	21 Hari	20,000,000	DD	√			2023
14	Bulan Bhakti Gotong - Royong (BBGRM)	Tluk Kualo Inderapura	4 Km	Masyarakat	10 Hari	20,000,000	DD	√			2023
15	Pembangunan Sanitasi Umum	Medan Baik dan R Lumang	3 Unit	Masyarakat	30 Hari	30,000,000	DD	√			2023
16	Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Tengah	Medan Baik	800 M	Masyarakat	30 Hari	25,000,000	DD	√			2023
17	Renovasi WC Poskesri Medan Baik	Medan Baik	1 Unit	Masyarakat	20 Hari	10,000,000	DD	√			2023
18	Pembangunan Rumah Sehat	Tluk Kualo	1 Unit	Masyarakat	21 Hari	30,000,000	DD	√			2023

19	Pembangunan Kawasan Agro Wisata	Medan Baik-Rimbo Lumang	500 M	Masyarakat	40 Hari	50,000,000	DD	√			2023
20	Pembangunan Ruang MDA	Medan Baik	4 Ruang	Pendidikan	60 Hari	100,000,000	DD	√			2023
21	Rabat beton Pinggir Lapangan Hijau Medan Baik	Medan Baik	1 Paket	Masyarakat	20 Hari	50,000,000	DD/APBD	√			2023
22	Lanjutan Pagar Poskesri Nagari	Medan Baik dan R Lumang	2 Unit	Masyarakat	30 Hari	30,000,000	DD	√			2023
23	Peningkatan Jalan Tluk Kualo - Tj Btg Kapas	Medan Baik	1 Km	Masyarakat	26 Hari	500,000,000	DD/APBD	√			2023
24	Peningkatan JALAN Kelompok Ganto Sori	Medan Baik	500 M	Masyarakat	20 Hari	20,000,000	DD/APBD	√			2023
25	Rabat Beton Jalan Gobah Tuanku Berdarah Putih	Medan Baik	120 M	Masyarakat	25 Hari	50,000,000	DD/APBD	√			2023
26	Pembangunan Saluran Buang Kelompok Pematang Nibung	Medan Baik	3 Unit	Pemuda dan Masyarakat	30 Hari	50,000,000	DD/APBD	√			2023
27	Perawatan Jaringan Wifi	Medan Baik	150 M	Masyarakat	30 Hari	80,000,000	DD/APBD	√			2023
28	Rehabilitasi Gedung Sanggar Nagari Sutan Lembak Tuah	Medan Baik	1 Paket	Pemerintah Nagari	12 Bulan	13,000,000	DD/APBD	√			2023
29	Rabat Beton Jalan Lbk Gdg Lamu-Medan Baik	Medan Baik dan R Lumang	600 M	Masyarakat	30 Hari	100,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
30	Rabat Beton Jalan Lupak Kandis (Ruas Tluk Kualo Inderapura -	Medan Baik	800 M	Masyarakat	21 Hari	150,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
31	Pembangunan POS Pemuda	Medan Baik	3 Unit	Pemuda dan Masyarakat	30 Hari	50,000,000	Pihak Ketiga	√			2023
32	Pembangunan Kantor BAMUS	Medan Baik	1 Unit	Bamus Nagari	31 Hari	80,000,000	Pihak Ketiga	√			2023
33	Pembangunan Kantor BUMNAG Bumi Sejahtera	Tluk Kualo	1 Unit	Pengurus BumNag	21 Hari	100,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
34	Pembangunan Dreinase Jalan utama Tluk Kualo-Tanjung Medan	Tluk Kualo Inderapura	2 KM	Masyarakat	22 Hari	100,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
35	Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Kelompok Tani	Medan Baik	1 Paket	Masyarakat	26 Hari	20,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
36	Penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	26 Hari	20,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
37	Pembangunan Akses Air Bersih (PDAM)	Tluk Kualo Inderapura	6 KM	Masyarakat	30 Hari	450,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
38	Pembangunan Jaringan Listrik	Tluk Kualo Inderapura	2,5 Km	Masyarakat	10 Hari	700,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023

		39	Normalisasi Batang Palokan	Tluk Kualo Inderapura	3 KM	Masyarakat	20 Hari	300,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
		40	Pembangunan Cagar Budaya Sejarah Tuanku Berdarah Putih	Tluk Kualo Inderapura	1 Unit	Masyarakat	30 Hari	500,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
		41	Pengaspalan Jalan Lintas Barat Tluk Kualo - Pulau Rajo	Medan Baik	2,2 KM	Masyarakat	20 Hari	4,400,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
		42	Lanjutan Pengaspalan Jalan Utama Tluk Kualo-Tanjung Medan	Rimbo Lumang	1,5 KM	Masyarakat	15 Hari	2,000,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
		43	Pembangunan Dermaga Pelelangan Lokan (DPL)	Tluk Kualo Inderapura	1 Unit	Masyarakat	20 Hari	500,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
		44	Pembangunan Gudang Pengolah Pupuk Organik	Tluk Kualo Inderapura	1 Unit	Masyarakat	21 Hari	150,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
		45	Pembangunan Saranan Prasarana SD 09 Airpura	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	22 Hari	300,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
		46	Pembangunan Saranan Prasarana SMP 4 Airpura	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	23 Hari	350,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
		47	Pengerasan Jalan ke SMPN 02 Airpura (Inderapura Timur)	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	30	350,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
		48	Peningkatan Jalan ke Muara Gedang	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	30	350,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
Jumlah		49	Pengeringan Rawa kawasan Kelompok Tani	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	24 Hari	100,000,000	APBD Kab/Prov	√			2023
3	Pembinaan Kemasyarakatan Nagari							13,524,000,000					
		1	Kegiatan Pembinaan Majelis Taqlim	Tluk Kualo Inderapura	1 x 12 Bulan	Majelis Taqlim	1 Tahun	5,000,000	ADD	√			2023
		2	Belanja Kelembagaan LPMN	Tluk Kualo Inderapura	1 x 12 Bulan	LPMN	1 Tahun	2,500,000	ADD	√			2023
		3	Kegiatan PHBN	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Nagari	1 Tahun	10,000,000	ADD	√			2023
		4	Kegiatan PHBI	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Nagari	1 Tahun	20,000,000	ADD	√			2023
		5	Kegiatan TP-PKK Nagari	Tluk Kualo Inderapura	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	8,000,000	ADD	√			2023
		6	Pembinaan Linmas	Tluk Kualo Inderapura	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	2,500,000	ADD	√			2023
		7	- Honorarium PPKBD	Tluk Kualo Inderapura	12 Bulan	Kader PPKBD	1 Tahun	900,000	ADD	√			2023
		8	Honorarium Dasa Wisma 10 Orang	Tluk Kualo Inderapura	12 Bulan	Kader PPKBD	1 Tahun	6,000,000	ADD	√			2023
		9	- Honorarium Sub PPKBD 2 Orang	Tluk Kualo Inderapura	12 Bulan	Kader PPKBD	1 Tahun	1,440,000	ADD	√			2023

		10	- Honorarium Kader Yandu 10 Orang	Tluk Kualo Inderapura	12 bulan	Kader Yandu	1 Tahun	6,000,000	ADD	√			2023
Jumlah		11	Pemberdayaan Kelembagaan KAN	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Lembaga KAN	7 Hari	2,500,000	ADD	√			2023
								64,840,000					2023
		1	Pelatihan/Studi Komperatif Aparatur Pemerintahan Nagari	Tluk Kualo Inderapura	16 Orang	Pemerintah Nagari	7 Hari	28,000,000	ADD	√			2023
		2	Kegiatan Latihan Sekolah Sepak Bola (SSB)	Tluk Kualo Inderapura	50 Orang	Bamus Nagari	7 Hari	15,000,000	DD	√			2023
		3	Peningkatan Kapasitas dan Study Banding Ketua TP.PKK Nagari	Tluk Kualo Inderapura	3 Orang	PKK Nagari	4 Hari	6,000,000	DD	√			2023
		4	Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik	Tluk Kualo Inderapura	10 Orang	Masyarakat	5 Hari	30,000,000	DD	√			2023
		5	Pelatihan Guru TPQ/TPSQ	Tluk Kualo Inderapura	10 Orang	Masyarakat	5 Hari	10,000,000	DD	√			2023
			Pengadaan Seragam Pengurus LPMN	Tluk Kualo Inderapura	10 Orang	Masyarakat	5 Hari	5,000,000	DD	√			2023
			Penangkar Bibit Bawang Merah	Tluk Kualo Inderapura	10 Orang	Masyarakat	5 Hari	10,000,000	DD	√			2023
		4	Honorarium Guru PAUD/TK	Tluk Kualo Inderapura	3 Orang	Guru PAUD	12 Bulan	23,400,000	DD	√			2023
		5	Honorarium Guru TPA/MDA	Tluk Kualo Inderapura	12 Orang	guru MDA	12 Bulan	93,600,000	DD	√			2023
		6	Penambahan Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita	Tluk Kualo Inderapura	50 Orang	Anak balita	1 Tahun	6,000,000	DD	√			2023
		7	Penambahan Gizi ibu Hamil Anemia dan Balita GIZI Kurang	Tluk Kualo Inderapura	20 Orang	Kader Yandu Dan Lansia	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
		8	Pelatihan Keterampilan Remaja Tluk Kualo	Tluk Kualo Inderapura	30 Orang	Remaja	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
		9	Pelatihan LPMN	Tluk Kualo Inderapura	8 Orang	Pengurus LPMN	3 Hari	3,000,000	DD	√			2023
	Pemberdayaan Kemasyarakatan	10	Kegiatan Linmas Sosialisasi Tertib ternak dan Lingkungan	Tluk Kualo Inderapura	30 Orang	Linmas	1 Tahun	8,000,000	DD	√			2023
		11	Pelatihan Smart Nagari Dan Siskuedes	Tluk Kualo Inderapura	11 Orang	Aparatur Pemerintah	8 Hari	30,000,000	DD	√			2023
		12	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Tluk Kualo Inderapura	5 Orang	Pemerintah Nagari	8 Hari	12,000,000	DD	√			2023

13	Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Bluk Kualo Inderapura	5 Orang	UMKM/Masyarakat	1 Tahun	30,000,000	DD	√			2023
14	Sosialisasi Cara Pemakaian dan Penanggulangan Gas LPG	Bluk Kualo Inderapura	400 Orang	Masyarakat Umum	1 Hari	7,000,000	DD	√			2023
15	Pemberdayaan UMKM	Bluk Kualo Inderapura	5 Orang	UMKM/Masyarakat	30 Hari	30,000,000	DD	√			2023
16	Pengembangan Kawasan Komunitas Pangan Lestari (Produk Unggulan Masyarakat)	Bluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	15 Hari	20,000,000	DD	√			2023
17	Sekolah Lapangan (SL) Petani	Bluk Kualo Inderapura	90 Orang	Petani	14 hari	30,000,000	DD	√			2023
18	Peningkatan Kapasitas Guru TPA/MDA	Bluk Kualo Inderapura	12 Orang	Guru TPA	7 Hari	7,000,000	DD	√			2023
19	Peningkatan Kapasitas Kader Yandu	Bluk Kualo Inderapura	10 Orang	Kader Yandu	3 Hari	5,000,000	DD	√			2023
20	Kegiatan Liga Desa	Bluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	15 Hari	20,000,000	DD	√			2023
21	Honorarium Guru PAUD/TK	Bluk Kualo Inderapura	3 Orang	Guru PAUD	12 Bulan	23,400,000	DD	√			2023
22	Honorarium Guru TPA/MDA	Bluk Kualo Inderapura	12 Orang	guru MDA	12 Bulan	93,600,000	DD	√			2023
23	Operasional Kegiatan TPA/MDA	Bluk Kualo Inderapura	12 Orang	guru MDA	12 Bulan	10,000,000	DD	√			2023
24	Pelatihan Pengolahan Limbah Kerang Lokan	Bluk Kualo Inderapura	10 Orang	Masyarakat	15 Hari	15,000,000	DD	√			2023
25	Pagelaran Seni dan Budaya Nagari	Bluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	5 Hari	75,000,000	DD	√			2023
26	Pelatihan Penggunaan Gas Elpiji Yang Baik	Bluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat	5 Hari	15,000,000	DD	√			2023
27	Pengadaan Baju Seragam untuk kader Nagari	Bluk Kualo Inderapura	80 Orang	Masyarakat	7 Hari	15,000,000	DD	√			2023
28	Pengadaan Baju Seragam untuk Komunitas CINTA BUMU	Bluk Kualo Inderapura	60 Orang	KOMUNITAS "CINTA BUMU"	7 Hari	5,000,000	DD	√			2023
29	Pengadaan Barang untuk dibagikan ke masyarakat	Bluk Kualo Inderapura	500 Rumah	Masyarakat	7 Hari	12,500,000	DD	√			2023
30	Pelatihan Menjahit TP-PKK	Bluk Kualo Inderapura	15 Orang	TP-PKK Nagari	30 Hari	20,000,000	DD	√			2023
31	Kegiatan Senam TP-PKK Nagari	Bluk Kualo Inderapura	50 Orang	PKK Nagari	1 Tahun	8,000,000	DD	√			2023

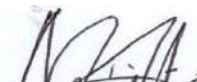
32	Pelatihan LPMN	Tluk Kualo Inderapura	8 Orang	Pengurus LPMN	3 Hari	3,000,000	DD	√			2023
33	Pelatihan SDM Pengurus Pemuda Nagari	Tluk Kualo Inderapura	20 Orang	Pengurus Pemuda Nagari	3 Hari	6,000,000	DD	√			2023
34	Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Membaca (Democratization of Reading)	Tluk Kualo Inderapura	100 Paket	Masyarakat	1 Tahun	65,000,000	DD	√			2023
35	Kegiatan Latihan Zikir Rabana	Tluk Kualo Inderapura	40 Orang	Kelompok Zikir Rebana	1 Tahun	3,000,000	DD	√			2023
36	Kegiatan Latihan Qasidah Rebana Majelis Ta'lim	Tluk Kualo Inderapura	10 Orang	Pengurus Majelis Ta'lim	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
37	Kegiatan Latihan Sanggar Seni Budaya	Tluk Kualo Inderapura	11 Orang	Sanggar Seni Budaya	1 Tahun	25,000,000	DD	√			2023
38	Pelatihan Komputer	Tluk Kualo Inderapura	15 Orang	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD	√			2023
39	Pembinaan Pengolahan Limbah Air Lokan	Tluk Kualo Inderapura	5 Orang	Penggiat Air Lokan	1 Tahun	50,000,000	DD	√			2023
40	Pengadaan Baju Seragam Guru TPA/MDA	Tluk Kualo Inderapura	12 Orang	Guru TPA	1 Tahun	7,000,000	DD	√			2023
41	Pembuatan Profil Nagari	Tluk Kualo Inderapura	600 KK	Pemerintah Nagari	1 Tahun	6,775,000	DD	√			2023
42	Kegiatan Wirid Remaja	Tluk Kualo Inderapura	80 Orang	Pemuda dan Masyarakat	1 Tahun	3,000,000	DD	√			2023
43	Pelatihan Manajemen Mesjid	Tluk Kualo Inderapura	12 Orang	Pengurus Mesjid	1 Tahun	5,000,000	DD	√			2023
44	Studi Banding Pengurus BUMNAG Bumi Sejahtera	Tluk Kualo Inderapura	10 Orang	Pengurus BUMNag	7 Hari	3,000,000	DD	√			2023
45	Penyertaan Modal BUMNag Bumi Sejahtera	Tluk Kualo Inderapura	1 Ha	Masyarakat	10 Hari	100,000,000	DD	√			2023
46	pelatihan pengurus posyantek	Tluk Kualo Inderapura	8 Orang	Kader Pemberdayaan	3 Hari	3,000,000	DD	√			2023
47	Kegiatan Penanganan stunting (konvergensi stunting)	Tluk Kualo Inderapura	80 Orang	Balita	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
48	Insentif Kader Nagari Siaga	Tluk Kualo Inderapura	2 Orang	Kader Nagari Siaga	12 Bulan	3,600,000	DD	√			2023
49	Insentif Kader BKB	Tluk Kualo Inderapura	1 Orang	Kader BKB	12 Bulan	600,000	DD	√			2023
50	Insentif Kader BKR	Tluk Kualo Inderapura	1 Orang	Kader BKR	12 Bulan	600,000	DD	√			2023
51	Insentif Kader BKL	Tluk Kualo Inderapura	1 Orang	Kader BKL	12 Bulan	600,000	DD	√			2023

		52	Insentif Kader PIKR	Tluk Kualo Inderapura	1 Orang	Kader PIKR	12 Bulan	600,000	DD	√			2023
		53	Insentif Kader Teknik	Tluk Kualo Inderapura	1 Orang	Kader Teknik	12 Bulan	600,000	DD	√			2023
		54	Penambahan Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita	Tluk Kualo Inderapura	50 Orang	Anak balita	1 Tahun	6,000,000	DD	√			2023
		55	Penambahan Makanan Tambahan (PMT) untuk Lansia	Tluk Kualo Inderapura	60 Orang	Lansia	1 Tahun	6,000,000	DD	√			2023
		56	Pemberdayaan Kader Yandu Anak dan Lansia	Tluk Kualo Inderapura	20 Orang	Kader Yandu Dan Lansia	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
		57	Penambahan Gizi ibu Hamil Anemia dan Balita GIZI Kurang	Tluk Kualo Inderapura	20 Orang	Kader Yandu Dan Lansia	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
		58	Kegiatan Penyuluhan Ibu Hamil	Tluk Kualo Inderapura	6 Orang	Kader Nagari	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
		59	Kegiatan Pemberian Reward Kepada Anak berPrestasi	Tluk Kualo Inderapura	5 Orang	Remaja	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
		60	Pengadaan Bibit Untuk Masyarakat	Tluk Kualo Inderapura	300 Orang	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
		61	Gerakan Penanaman Pohon	Tluk Kualo Inderapura	15 Orang	Komunitas "CINTA BUMI"	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
		62	Penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Tluk Kualo Inderapura	15 Orang	Komunitas "CINTA BUMI"	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
		63	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pembibitan	Tluk Kualo Inderapura	15 Orang	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
Jumlah		64	Pelatihan Keterampilan Remaja	Tluk Kualo Inderapura	30 Orang	Remaja	1 Tahun	10,000,000	DD	√			2023
								1,199,875,000					2023
5	Dana Tak Terduga	1	Tanggap Darurat	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Pemerintah Nagari	1 Tahun	70,000,000	DD	√			2023
		2	BLT Dana Desa	Tluk Kualo Inderapura	150	Masyarakat Miskin	1 Tahun	270,000,000	DD	√			2023
		3	Penanganan Covid-19	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Masyarakat Miskin	1 Tahun	100,000,000	DD	√			2023
Jumlah		4	Keadaan Mendesak	Tluk Kualo Inderapura	1 Paket	Pemerintah Nagari	1 Tahun	100,000,000	DD	√			2023
Jumlah								540,000,000					
Jumlah								16,131,196,572					

Mengetahui :
Wali Nagari



Tluk Kualo Inderapura, 13 Desember 2022
Tim Perumus RKP Nagari
Ketua





DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alis Fiki Indra', written on a light blue rectangular background.

ALIS FIKI INDRA, S.Kom